

SKRIPSI

**ORIENTASI POLITIK MASYARAKAT ADAT PENGHAYAT
KEPERCAYAAN ADA' MAPPURONDO DI DESA PENATANGAN
TAHUN 2019-2024**



SAELMI

F0120334

**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL ILMU POLITIK DAN HUKUM
UNIVERSITAS SULAWESI BARAT
MAJENE
2024**

HALAMAN PENGESAHAN

JUDUL : ORIENTASI POLITIK MASYARAKAT ADAT
PENGHAYAT KEPERCAYAAN ADA'
MAPPURONDO DI DESA PENATANGAN TAHUN
2019-2024

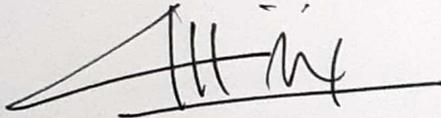
NAMA : SAELMI
NIM : F0120334
PROGRAM STUDI : ILMU POLITIK

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan guna memenuhi persyaratan untuk
Ujian Skripsi memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Politik (S1).

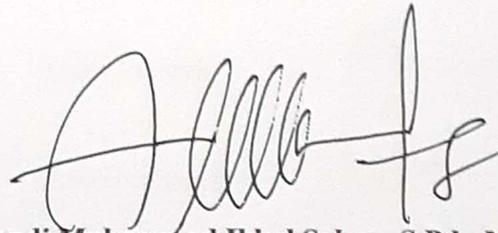
Majene, 05 November 2024

Pembimbing I

Pembimbing II



Muhammad, S.IP, M.Si
NIP: 198707022015041001



Andi Muhammad Iqbal Salam, S.Pd., M.Fil.I
NIP: 198702042022031008

Mengesahkan:

Dekan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik dan Hukum



Dr. H. Burhanuddin, M.Si
NIP: 196209101989031004

SKRIPSI
ORIENTASI POLITIK MASYARAKAT ADAT PENGHAYAT
KEPERCAYAAN ADA' MAPPURONDO DI DESA PENATANGAN
TAHUN 2019-2024

Dipersiapkan dan disusun oleh:

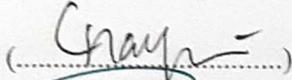
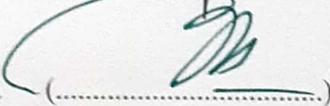
SAELMI

F0120334

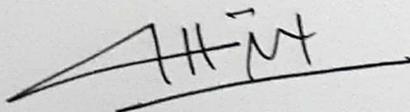
Telah diujikan di depan Dewan Penguji

Pada tanggal 05 November 2024, dan dinyatakan LULUS

Susunan Dewan Penguji:

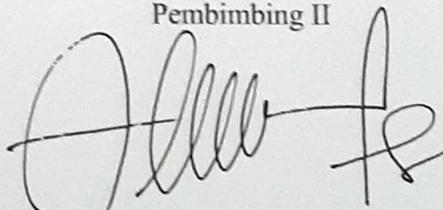
Nama penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1. Dr. Muhammad Sultan, M.Si	Ketua Penguji	
2. Citra N. Fariaty, S.IP. M.Si	Penguji Utama	
3. Dr. H. Burhanuddin, M.Si	Penguji/Anggota	

Pembimbing I



Muhammad, S.IP, M.Si
NIP: 198707022015041001

Pembimbing II



Andi Muhammad Ikbal Salam, S.Pd., M.Fil.I.
NIP: 198702042022031008

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Orientasi Politik Masyarakat Adat Penghayat Kepercayaan Ada' Mappurondo Di Desa Penatangan Tahun 2019-2024 di Kecamatan Buntu Malangka', Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat. Faktor-Faktor yang mempengaruhi Orientasi Politik Masyarakat Adat Penghayat Kepercayaan Ada' Mappurondo Di Desa Penatangan Tahun 2019-2024 tersebut pada Pemilihan Legislatif Kabupaten Mamasa Tahun 2019. Penelitian ini menggunakan Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif dengan Teknik pengumpulan data berupa Observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun Teori yang digunakan adalah teori Orientasi Politik yang dirumuskan oleh Farson dan Shills, yang mana keduanya mengklasifikasikan Orientasi politik kedalam tiga bentuk yakni Orientasi politik Kognitif, Orientasi politik Efektif, dan Orientasi politik Evaluatif. Hasil penelitian adalah masyarakat adat Penghayat Kepercayaan Ada' Mappurondo di Desa Penatangan menunjukkan keterlibatan aktif dalam proses politik dengan menekankan kejujuran, integritas, dan komitmen calon pemimpin terhadap kepentingan umum dan pelestarian budaya mereka. Ritual adat berfungsi sebagai medium penting untuk menyampaikan pesan politik dan dukungan terhadap calon pemimpin, serta memfasilitasi komunikasi antara masyarakat dan kandidat. Masyarakat ini mengharapkan sistem politik yang inklusif dan adil, dengan pengakuan serta perlindungan terhadap hak-hak mereka dalam kebijakan publik, sehingga nilai-nilai budaya mereka dapat terintegrasi dalam sistem demokrasi yang lebih luas.

Kata kunci: Orientasi Politik, Pemilihan Legislatif, Masyarakat Adat, dan Penghayat Kepercayaan

ABSTRACT

This study aims to understand the Political Orientation of the Indigenous People Adhering to the Ada' Mappurondo Belief in Penatangan Village from 2019 to 2024 in Buntu Malangka' District, Mamasa Regency, West Sulawesi Province. The factors influencing the Political Orientation of the Indigenous People Adhering to the Ada' Mappurondo Belief in Penatangan Village from 2019 to 2024 were observed during the Mamasa Regency Legislative Election of 2019. This research employs a Qualitative Descriptive Research Method with data collection techniques including Observation, Interviews, and Documentation. The theory used is the Political Orientation theory formulated by Farson and Shills, which classifies Political Orientation into three forms: Cognitive Political Orientation, Affective Political Orientation, and Evaluative Political Orientation. The results of the study show that the indigenous people adhering to the Ada' Mappurondo belief in Penatangan Village demonstrate active involvement in the political process, emphasizing the honesty, integrity, and commitment of the prospective leaders towards the public interest and the preservation of their culture. Traditional rituals serve as an important medium to convey political messages and support for the candidates, as well as facilitate communication between the community and the candidates. This community expects an inclusive and fair political system, with recognition and protection of their rights in public policies, so that their cultural values can be integrated into the broader democratic system.

Keywords: Political Orientation, Legislative Election, Indigenous People, and Belief Adherents

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada pemilihan Legislatif Kabupaten Mamasa Tahun 2019 Orientasi Politik Masyarakat Desa Penatanganan didominasi oleh Orientasi politik Efektif, yakni Orientasi Politik yang senantiasa hidup dan bergerak dalam bingkai perasaan dan berdasarkan aspek-aspek emosional yang dimiliki oleh Individu terhadap objek politik, yaitu berupa persamaan suku, Agama, dan persamaan dalam pilihan Politik (partai).

Sementara itu, Orientasi Politik Kognitif dan Evaluatif diketahui juga memiliki pengaruh terhadap pilihan Politik Masyarakat Desa penatanganan, namun tidak sekuat dan semasif Orientasi politik efektif. Menguatnya pengaruh orientasi Politik Masyarakat Adat Penghayat Kepercayaan Ada' Mappurondo Desa Penatanganan, dipengaruhi oleh beberapa Faktor, yakni kuatnya ikatan kekerabatan dan rasa kekeluargaan. Faktor-Faktor yang mempengaruhi Orientasi Politik Masyarakat Adat Penghayat Kepercayaan Ada' Mappurondo Di Desa Penatanganan Tahun 2019-2024 tersebut pada Pemilihan Legislatif Kabupaten Mamasa Tahun 2019. Adapun Teori yang digunakan adalah teori Orientasi Politik yang dirumuskan oleh Farson dan Shills, yang mana keduanya mengklasifikasikan Orientasi politik kedalam tiga bentuk yakni Orientasi politik Kognitif, Orientasi politik Efektif, dan Orientasi politik Evaluatif.

Hal ini ditandai oleh kecenderungan masyarakat adat penghayat kepercayaan ada' mappurondo Desa penatangan dimana cara berpolitiknya mengaitkan dengan Budaya. Budaya yang biasa dilakukan adalah Budaya Gotong royong yang Bersatu dalam menentukan atau memilih satu kandidat baik pilkades, pileg, pilgub, maupun pilpres dan mempertimbangkan hubungan kekerabatan dan rasa kekeluargaan tertentu dalam pilihan Politiknya. Sehingga menarik untuk di teliti karena Cara berpolitik Masyarakat Pengahayat Kepercayaan Ada' Mappurondo di DesaPenatangan sangat unik, karena di tempat lain jarang ditemukan cara berpolitiknya seperti di desa penatangan. Sehingga bertolak belakang dengan prinsip Demokrasi yang langsung, Umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Peneliti Lebih tertarik ke Orientasi Politik Masyarakat Adat Penghayat Kepercayaan Ada' Mappurondo di desa Penatangan dibandingkan dengan ajaran lain (Agama lain) seperti Agama Kristen, karena penghayat kepercayaan ada' Mappurondo merupakan etnis minoritas yang ada di kabupaten Mamasa dan masih kental dengan budaya, adat istiadat dan orientasi politik masyarakat Mappurondo dibentuk oleh kepercayaan berdasarkan yang dipercaya dan ajaran yang diterima dari pemangku adat secara lisan yang dituruntemurunkan dari nenek moyang. Berbeda dengan agama-agama lain seperti agama Kristen sebagai kepercayaan mayoritas di kabupaten mamasa yang orientasi politiknya dibentuk dengan Konsep kepemimpinan Kristen yang menggunakan kitab suci atau alkitab. Kristen melihat pemerintah sebagai perpanjangan tangan Tuhan

dalam memberikan tatanan sosial dalam Pemerintahan, dan yang terpilih itulah pilihan Tuhan.

Almond dan Verba Mendefinisikan Orientasi politik juga dapat dikatakan sebagai budaya Politik terutama mengacu pada orientasi politik sikap seseorang atau kelompok masyarakat terhadap sistem politik dan bagian-bagiannya (sub-sub sistem politik) dan bagaimana sikapnya terhadap perannya sendiri dalam sistem politik. Argumentasi tersebut menunjukkan bahwa orientasi politik diharapkan dapat menjadi sarana bagi terwujudnya masyarakat yang memiliki pengetahuan mengenai persoalan politik serta memahami hak dan kewajibannya sebagai warga Negara yang bermoral dan beretika. Dengan kata lain orientasi politik memilikimakna yang penting dan strategis dalam rangka mendorong warga Negara untuk memiliki pengetahuan politik memadai yang dapat dituangkan dalam pendidikan.¹

Masyarakat kepercayaan Ada' Mappurondo desa Penatangan dalam menyikapi kontestasi politik dalam hal penentuan pemimpin baik legislatif maupun eksekutif, selalu memperhatikan kekompakan dan persatuan untuk mewujudkan konsep politik identitas dan menganggap bahwa pemimpin yang akan terpilih akan memperhatikan komunitas penghayat Mappurondo baik di wilayah desa Penatangan, maupun masyarakat Ada' Mappurondo pada umumnya di kabupaten Mamasa bahkan Bangsa dan Negara pada umumnya. Keunikan masyarakat Penghayat Ada' Mappurondo desa penatangan menjadi

¹Hairil Anwar (2015), *Orientasi Politik Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Umum Kepala daerah Provinsi Kalimantan barat tahun 2012 di SMK Negeri 1 Pontianak*, Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, vol. 20. No 1, Kalimantan Barat : hlm 2

daya tarik tersendiri para figur politik kabupaten Mamasa, karena bagi calon pemimpin yang berhasil menarik hati para pemilih khususnya para tokoh Penghayat Kepercayaan Ada' Mappurondo berpotensi dipilih mayoritas bahkan sering terjadi perolehan calon pemimpin baik legislatif maupun eksekutif di atas 90% jika disukai dan dianggap mampu mewakili aspirasi masyarakat adat desa Penatangan.

Kecenderungan orientasi politik dalam masyarakat adat dapat sangat bervariasi tergantung pada budaya, nilai-nilai, dan sejarah mereka. Namun kecenderungan Masyarakat Penghayat Ada' Mappurondo desa Penatangan sebagai Masyarakat yang menjaga keotonomian daerahnya berusaha untuk memilih pemimpin yang dapat mengakodasi hal tersebut, mereka cenderung memilih mengatur masyarakatnya secara internal, lalu pemerintah dapat mengatur hal-hal yang lebih besar. Namun Upaya untuk melestarikan warisan budaya dan menjaga keberlanjutan lingkungan alam juga menjadi perhatian mereka. Masyarakat adat sering pula berjuang untuk mempertahankan hak atas tanah dan sumber daya alam tradisional mereka dari intrusi pihak eksternal seperti pemerintah atau perusahaan swasta. Maka dari itu, Masyarakat Penghayat Ada' Mappurondo desa Penatangan sangat berhati-hati dalam memilih calon yang dirasa dapat mengakodir kepentingan tersebut. Sehingga mereka cenderung memilih calon legislative seperti Calon Anggota DPR dan DPR RI maupun eksekutif yang memiliki kedekatan emosional, kekeluargaan ataupun kesamaan budaya.

Orientasi masyarakat adat penghayat kepercayaan ada' mappurondo desa penatangan pada pemilihan legislatif tahun 2019-2024 didominasi oleh kelompok pemilih milenial dan elit masyarakat yang dianggap berpengaruh dan punya rekam jejak dalam memimpin masyarakat adat baik dalam kelembagaan maupun dalam komunitas ada' mappurondo. Pada dasarnya ada' mappurondo sudah ada sejak Tuhan menciptakan manusia. Manusia berkembang dan hidup di alamini Bersama dengan mahluk hidup dan benda-benda ciptaan Tuhan lainnya. Kehidupan sosial masyarakat ada' mappurondo kala itu belumlah terorganisir.

Pada tahun 1962 bapak Nani Patta (Nanias) dan bapak Tampo Bersama para pemuda lainnya di dusun Rantepalado Desa Bambang kecamatan Mambi kabupaten Polewali Mamasa. Mereka mulai merintis organisasi mappurondo namun keanggotaannya baru berkisar Rantepalado dan sekitarnya. Saat itu para perintis menemui banyak tantangan dan cukup beragam dari pihak lain dengan berbagai motif dan alasan sehingga memaksa para perintis jalan dibawah tanah untuk mengembangkan sayapnya. Mereka dengan semangat juang yang tinggi memasuki kampung demi kampung dan akhirnya tiba di Kondorubak (salah satu kampung hunian penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa) di Desa Buntu Malangka' kecamatan Mambi. Walau menuai banyak tekanan namun pada akhirnya mereka dapat bertemu dengan pemimpin hadat (tomatua tondak) untuk menyampaikan misinya²

² Dettu. (2024, Januari 14). Deskripsi Singkat Organisasi Mappurondo Kabupaten Mamasa. (Saelmi, Pewawancara)

Atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan kegigihan mereka, akhirnya pada tanggal 1 September 1986 bertempat di dusun Rantepalado desa Bambang Kecamatan Mambi kabupaten Polewali Mamasa provinsi Sulawesi Selatan, diadakanlah musyawarah untuk membentuk pengurus organisasi Ada' Mappurondo yang keanggotaannya meliputi: Desa Bambang, Desa Buntu Malangka', Desa Aralle, Desa Rantebulahan Timur, Kelurahan Mambidan Desa Mehalaan (sudah berkapasitas Pitu Ulunna Salu). Periode kepengurusan ini lamanya 4 tahun.

Pengurus terpilih pada periode ke satu (1986 s.d. 1990) antara lain: Ketua Umum Nantias; sekretaris umum Tampo; pembantu umum Buntu, S.H.; ketua I Andarias; Ketua II P. Tampuk; Sekretaris I Toris; Sekretaris II Menam; Bendahara I Yunus; Bendahara II Geradus. Pada periode ini pengurus baru melakukan sosialisasi dan konsolidasi internal ke seluruh anggota untuk saling mengenal dan saling bekerja Bersama-sama memajukan organisasi yang telah dibentuk. Selain itu juga dilakukan penjejakan arah dan Langkah yang dilakukan untuk mendapatkan legalitas keberadaan organisasi.

Periode ke dua (tahun 1990 s.d. 1994). Pada periode ini musyawarah menetapkan pengurus antara lain : Ketua umum : Nantias; Ketua I Titus; Ketua II Silas Tauati, Sekretaris Umum Buntu; Sekretari I Tampo; Sekretaris II Yubal; Sekretaris III Andarias, Bendahara Umum Toris; Bendahara I Thimotius; Bendahara II P. Puak Uji; Bendahara III Sellek. Berakhirnya Periode ini tidak pernah lagi dilakukan pergantian pengurus sampai tahun 2010.

Periode ke tiga (tahun 2010 s.d. 2014). Pengurus terpilih adalah Ketua I Dettu, S.Pd, ketua II Toris; Sekretaris I Buntu, S.H., Sekretaris II Tampo; Bendahara I Kendek, Bendahara II Betten. Periode ini, pengurus sudah banyak melakukan kegiatan untuk kemajuan organisasi. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan antara lain: Kunjungan pengurus ke ranting-ranting dalam rangka sosialisasi dan konsolidasi penguatan eksistensi sebagai penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YME, Menjejaki Peraturan Daerah (PERDA) tentang organisasi ada' Mappurondo, Keseragaman penggunaan identitas Kepercayaan, Penyampaian aspirasi ke pemerintah daerah terkait identitas penghayat kepercayaan, Keterwakilan di legislative, Payung hukum keberadaan ada' Mappurondo di kabupaten Mamasa (terbit SK Bupati Mamasa Nomor 220/KPTS-01.f/I/2012 tentang Ada' Mappurondo di Kabupaten Mamasa).. Kemudian hasil koordinasi yang terjalin baik antara pengurus dengan pemerintah daerah kabupaten Mamasa, sehingga pengurus dapat difasilitasi untuk mengikuti kongres Nasional kepercayaan terhadap Tuhan YME dan masyarakat adat tahun 2012 di Surabaya, dan studi banding ke Kabupaten Malang pada tahun 2014³

Periode ke empat (tahun 2014 s.d. 2018). Pengurus terpilih adalah: Ketua I Makdem, S.Pd; Ketua II Dettu, S.Pd; Sekretaris I Seknak, S.H., Sekretaris II Buntu, S.H; Bendahara I Januari; Bendahara II Bettem. Kegiatan organisasi yang dilakukan pada periode ini selain melanjutkan semua program

³ Dettu. (2024, Januari 14). Deskripsi Singkat Organisasi Mappurondo Kabupaten Mamasa. (Saelmi, Pewawancara)

yang tidak sempat dilaksanakan pada periode sebelumnya, dilaksanakan juga beberapa kegiatan yang antara lain: Sarasehan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa tingkat kabupaten Mamasa tahun 2015, mengikuti kegiatan Bimbingan Teknik penyuluh kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa tahun 2016 di Semarang, Jawa Tengah, mengikuti dialog nasional “Revitalisasi tahun 2017 di Palu.

Periode kelima (tahun 2018 s.d. 2023). Pengurus terpilih adalah: Ketua I Dettu, S.Pd., Ketua II Buntu, S.H., Sekretaris I Resbi. M, S.M., Sekretaris II Iwan, S.Pd., Bendahara I Sarniwadison, Bendahara II Ukuk. Pada periode ini pengurus bekerja lebih maksimal untuk melakukan perbaikan administrasi dan legalitas organisasi⁴

Pada tanggal 17 Oktober 2018 telah terbit Tanda Inventarisasi dari Direktorat kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Riset dan Teknologi. Ikut berpartisipasi dalam kegiatan Dialog Nasional yang diselenggarakan oleh DITKMA Kemendikbud Ristek. Berpartisipasi mengikuti Bimbingan Teknik dan Uji Kompetensi Penyuluh Kepercayaan Terhadap Tuhan YME yang diselenggarakan oleh Direktorat Kepercayaan dan Masyarakat Adat KEMDIKBUDRISTEK.

⁴ Dettu. (2024, Januari 14). Deskripsi Singkat Organisasi Mappurondo Kabupaten Mamasa. (Saelmi, Pewawancara)

1.2 Rumusan Masalah

Permasalahan utama pada penelitian ini yaitu hilangnya prinsip demokrasi yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil (Luber dan Jurdil). Oleh sebab itu, penulis ingin merumuskan masalah untuk menjadi kajian dan fokus penelitian yang hendak akan dilaksanakan sesuai jadwal yang ditentukan:

- a. Bagaimana Orientasi Politik Masyarakat Adat Penghayat Kepercayaan Ada' Mappurondo Di Desa Penatangan Tahun 2019-2024?
- b. Bagaimana faktor pendukung orientasi politik masyarakat Penghayat Kepercayaan Mappurondo desa Penatangan pada pemilihan legislatif tahun 2019?

1.3 Tujuan Penelitian

Berikut beberapa tujuan yang hendak akan dicapai dalam penelitian berdasarkan latar belakang dengan tema Orientasi Politik Masyarakat Adat Penghayat Kepercayaan Ada' Mappurondo Di Desa Penatangan Tahun 2019-2024 antara lain:

- a. Untuk mengetahui Bagaimana Orientasi Politik Masyarakat Adat Penghayat Kepercayaan Ada' Mappurondo Di Desa Penatangan Tahun 2019-2024
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor lainnya yang mempengaruhi oerientasi politik masyarakat adat penghayat kepercayaan ada' mappurondo.

1.4 Manfaat Penelitian

Beberapa manfaat yang hendak akan dicapai pada penelitian yang akan dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan antara lain sebagai berikut:

- a. Untuk menambah wawasan calon peneliti terkait Orientasi Politik Masyarakat Adat Penghayat Kepercayaan Ada' Mappurondo Di Desa Penatangan Tahun 2019-2024
- b. Untuk menambah referensi pengetahuan umum khususnya bagi dunia pendidikan dan demi kemajuan bangsa dan Negara terkait partisipasi politik masyarakat adat penghayat kepercayaan ada' mappurondo desa Penatangan, kecamatan BuntuMalangka'

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya dijadikan sebagai faktor pendukung yang dapat membantu penyelesaian penelitian ini, Terkhusus penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang sedang dibahas dalam penelitian ini. Berikut penelitian terdahulu yang dijadikan acuan adalah:

Sulaiman dalam jurnal “Problem pelayanan terhadap kelompok Penghayat Kepercayaan di Pati, Jawa tengah”. Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif, sehingga kajian yang dilakukan lebih dapat menangkap fenomena secara tepat berupa kelompok Penghayat Kepercayaan yang berkembang di Masyarakat, terutama yang berkembang di masyarakat pati, Jawa Tengah. Hasil Penelitian ini adalah Pelayanan terhadap kelompok Penghayat Kepercayaan, secara umum belum optimal, khususnya pelayanan terhadap Pendidikan agama. Dalam pelayanan Pendidikan ini masih diskriminatif karena penghayat Kepercayaan belum menjadi Agama⁵.

Jefri Andri Saputra dalam jurnal “Wahyu dalam Aluk Mappurondo” Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah cross-textual reading atau pembacaan lintas teks yaitu pendekatan yang mengupayakan tindakan “negosiasi” Alkitab dengan teks-teks suci dalam konteks asia agar dapat membentuk identitas multi kitab-suci. Hasil dari penelitian Ini adalah

⁵Sulaiman (2018) *Problem pelayanan terhadap kelompok penghayat Kepercayaan di pati, jawa tengah.*, jurnal sMaRT Studi masyarakat, vol. 04 No 2 Desember, jawa Tengah , hlm. 211.

kekristenan tidak seharusnya mengklaim dirinya sebagai satu-satunya agama yang menerima wahyu otoritatif. `Agama lain layak menerima wahyu Allah dan wahyu tersebut perlu diakui. Secara parktis Peniadaan “pagar” dan klaim kebenaran sepihak ini dapat diwujudkan oleh penganut Kristen di mamasa dengan menghapus label “to malillim”⁶.

Ahmad ChoirulRofiq dalam jurnal “Kebijakan pemerintah terkait hak sipil Penghayat Kepercayaan dan implikasinya terhadap perkembangan Penghayat Kepercayaan di Ponorogo”. Penelitian Kualitatif dengan menggunakan data Dokumen (literature) dan wawancara yang berkenaan dengan kebijakan pemerintah, Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang MahaEsa. (Terutama HPK Ponorogo), dan gambaran umum tentang ponorogo yang menjadi Lokasi penelitian. Berdasarkan Penjelasan yang sudah dijelaskan di pembahasan, maka dapat dinyatakan bahwa kebijakan pemerintah yang memberikan perlindungan hukum kepada Para Penghayat Kepercayaan dengan menerbitkan peraturan yang terkait dengan hak-hak sipil Penghayat Kepercayaan mempunyai dampak signifikan dalam perkembangan HPK di Ponorogo⁷.

2.2 Teori Orientasi Politik

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, pengertian orientasi didefinisikan sebagai “peninjauan untuk menentukan sikap yang tepat dan

⁶Jefri Andri Saputra (2022). *Wahyu dalam aluk Mappurondo*, Jurnal teologi dan pendiodikan Kristen, vol. 3 no 2, Toraja, hlm. 165

⁷Ahmad ChoirulRofiq (2014),*Kebijakan pemerintah terkait hak sipil penghayat kepercayaan dan impilkasinya terhadap perkembangan penghayat kepercayaan di Ponogoro*, Kodifikasia, Vol 8, no. 1, hlm. 13.

benar atau pandangan yang mendasari pikiran, perhatian maupun kecenderungan”. Selain itu, orientasi juga erat kaitannya dengan pengenalan terhadap kehidupan sosial, budaya dan lingkungan di sekitar individu yang bersangkutan.

Orientasi Politik secara umum menurut Gabriel Almond, dimaknai sikap terhadap sistem Politik dan bagian-bagiannya yang lain serta sikap terhadap peranan kita sendiri dalam sistem tersebut. Selanjutnya Menurut Goeltom, Orientasi Politik merupakan suatu cara pandang masyarakat baik yang homogeny maupun heterogen dalam struktur masyarakat tersebut yang dilatarbelakangi oleh nilai-nilai yang ada dalam masyarakat maupun yang berada diluar masyarakat sehingga dapat membentuk sikap dan menjadi terpola oleh mereka untuk memandang suatu objek politik⁸. Berdasarkan dari kedua teori tersebut bahwa Orientasi Politik adalah sikap terhadap sistem politik dan cara pandang masyarakat yang dilatar belakangi oleh nilai-nilai yang ada dalam masyarakat maupun diluar masyarakat.

Orientasi politik dapat dibagi menjadi tiga dimensi utama: orientasi politik efektif, kognitif, dan evaluatif. Ketiganya mencerminkan cara individu atau kelompok berhubungan dengan sistem politik mereka. Berikut penjelasan masing-masing:

1. Orientasi Politik Efektif berkaitan dengan perasaan, emosi, dan sikap afektif terhadap objek-objek politik, seperti partai politik, pemimpin, dan

⁸Noralia Priyant i& Robi Cahya di Kurniawan (2014). *Orientasi politik masyarakat dalam pemilukada lampung barat 2012*, Jurnal Administrasi Negara, vol 3 no 1, Universitas Lampung :hal 78

kebijakan. Orientasi ini mencakup tingkat ketertarikan atau ketidakpedulian, dukungan atau penolakan, serta cinta atau kebencian terhadap berbagai aspek politik. Contoh: rasa bangga atau kecewa terhadap pemimpin negara, rasa marah atau puas terhadap kebijakan tertentu⁹

2. Orientasi Politik Kognitif mencakup pengetahuan dan informasi yang dimiliki individu tentang sistem politik, lembaga, peran, dan proses-proses politik. Orientasi ini menilai seberapa banyak seseorang memahami tentang politik dan bagaimana mereka memperoleh serta mengolah informasi politik. Contoh: pengetahuan tentang bagaimana proses pemilihan umum berlangsung, pemahaman tentang fungsi parlemen atau pengetahuan tentang sejarah partai politik¹⁰
3. Orientasi Politik Evaluatif berkaitan dengan penilaian atau evaluasi individu terhadap objek-objek politik berdasarkan nilai-nilai, standar, dan keyakinan pribadi. Orientasi evaluatif melibatkan penilaian baik atau buruk, benar atau salah terhadap kebijakan, institusi, dan perilaku politik. Contoh: evaluasi terhadap keefektifan kebijakan ekonomi pemerintah, penilaian moral terhadap tindakan korupsi oleh pejabat publik¹¹

⁹ Irwansyah Mansyur, "Rasionalitas Orientasi Politik Masyarakat Nelayan Kabupaten Majene Pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014," *Jurnal Magister Ilmu Politik* 5, no. 1 (2020): 152–180, [http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/3635/2/19_P4300216308%28FILEminimizer%29 ... ok 1-2.pdf](http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/3635/2/19_P4300216308%28FILEminimizer%29...ok%201-2.pdf).

¹⁰ Asriani and Nizar, "Orientasi Politik Panggulang Pada Pemilihan Kepala Desa Karana," *Jurnal Fase Kemajuan Sosial dan Politik: Faksi* 9, no. 3 (2023): 11–20.

¹¹ Indah Puspitasari, "Persepsi Dan Orientasi Politik Generasi Muda Terhadap Pemilihan Partai Politik," *De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 4, no. 3 (2024): 76–85.

Ketiga dimensi orientasi politik ini bersama-sama membentuk sikap dan perilaku politik individu, yang pada gilirannya mempengaruhi partisipasi politik dan stabilitas sistem politik secara keseluruhan.

2.2.1 Pengertian Adat

Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia Adat Adalah aturan (perbuatan) yang lazim diturut atau dilakukan sejak dahulu kala; cara (kelakuan) yang sudah menjadi kebiasaan; wujud gagasan kebudayaan yang terdiri atas nilai-nilai budaya, norma, hukum dan aturan yang satu dengan yang lainnya berkaitan menjadi suatu sistem.

a. Kepercayaan Ada' Mappurondo

Menurut Sulaiman Penghayat kepercayaan adalah setiap orang yang mengakui dan meyakini nilai-nilai Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa¹². Sedangkan Ahmad Choirul Rofiq Istilah “Kepercayaan” merupakan sebuah bagi sistem religi di Indonesia yang tidak termasuk dari salah satu agama-agama resmi¹³. Dapat disimpulkan bahwa Penghayat Kepercayaan merupakan kelompok yang terdiri dari suku-suku asli yang menjunjung tinggi Kepercayaan Tradisionalnya yang memiliki beragam keyakinan dari berbagai daerah.

Ada' mappurondo adalah suatu komunitas atau sekelompok masyarakat patenbayan dengan adat dan kebiasaan atau tradisi yang

¹² Sulaiman (2018) *Problem pelayanan terhadap kelompok penghayat kepercayaan di pati, jawa tengah*, jurnal sMaRT Studi masyarakat, vol. 04 No 2 Desember, jawa tengah, hlm. 211.

¹³ Ahmad ChoirulRofiq (2014) *kebijakan pemerintah terkait hak sipil penghayat kepercayaan dan impikasinya terhadap perkembangan penghayat kepercayaan di ponorogo*, Kodifikasi, vol 8, no. 1, hlm. 3.

dilaksanakan secara turun temurun dengan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa dengan ajaran moral, ahlak, kepribadian serta perilaku masyarakatnya yang mengasihi dan saling menolong sesama manusia, makhluk hidup ciptaan tuhan lainnya, serta bumi dan segala isinya.

Kelompok masyarakat ada' mappurondo, dikenal keramahannya dan sistem gotong royang yang tinggi dan saling menolong satu dengan yang lainnya. Selain menjunjung tinggi nilai-nilai budaya, masyarakat ada' mappurondo juga memiliki nilai-nilai sosial tinggi, baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial, pendidikan, budaya maupun dalam hubungannya dengan individu-individu.

Ada' mappurondo selain eksis dalam kalangan masyarakat umum, Negara juga memberikan jaminan perlindungan sebagai komunitas yang sejajar dengan 6 agama yang diakui di Negara Indonesia dengan menetapkan konstitusi dan undang-undang dibawahnya sebagai landasan hukum yang kuat sehingga nilai dan kedudukan yang sama di hadapan hukum maupun dalam kalangan masyarakat umum. Adapun kebijakan (Undang-undang) yang mengatur dan menjamin keberadaan dan eksistensi ada' mappurondo antara lain:

- a) Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 29 yaitu “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk menurut agamanya dan kepercayaannya itu”.

- b) Putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XIV/2016. Penghayat kepercayaan juga telah diakui dalam Undang-Undang Adminduk yaitu UU No. 23 Tahun 2006 dan UU No. 24 Tahun 2013.

2.3 Kerangka Pikir

Kerangka pikir membantu peneliti untuk memahami hubungan antar variabel yang akan digunakan dalam penelitian. Dengan menggambarkan di bagan sebagai berikut:



Gambar 2.1 kerangka pikir

Di atas merupakan kerangka berfikir penelitian sebagai alur penelitian ataupun tahapan-tahapan yang harus peneliti lakukan dengan tujuan dapat menghasilkan solusi berdasarkan rumusan masalah yang telah dijabarkan sebelum nya. Dalam konteks politik masyarakat desa Petangan yang mengutamakan konsep Ada' Mappurondo, penghubungan antara struktur sosial dan sistem kepercayaan yang merupakan ciri khas Penghayat Kepercayaan Ada' Mappurondo menjadi sangat relevan dengan teori orientasi politik. Stratifikasi sosial di Desa Penatangan menggambarkan empat

kelompok utama, dengan Pemangku Adat menempati posisi tertinggi, bertugas menjaga dan melaksanakan adat dan kepercayaan Ada' Mappurondo. Pemuka Adat dan Tokoh-tokoh Adat, sebagai bagian dari struktur sosial, turut mendukung dalam menjalankan tugas-tugas adat serta berperan sebagai mediator dalam penyelesaian konflik. Di tingkat yang lebih bawah, Kepala Keluarga dihormati karena tanggungjawabnya dalam memimpin dan melindungi keluarganya sesuai dengan nilai-nilai kepercayaan Ada' Mappurondo.

Teori orientasi politik menyoroti bahwa pandangan politik suatu masyarakat tak hanya dipengaruhi oleh faktor politik semata, tetapi juga oleh aspek kebudayaan dan kepercayaan. Konstruksi sosial manusia, seperti kepercayaan Ada' Mappurondo dan konsep kebudayaan masyarakat Desa Petangan, terbentuk melalui proses interaksi sosial yang kompleks antara individu dalam masyarakat. Fokus pada tiga orientasi politik yang dihasilkan dari teori orientasi politik dan kepercayaan Ada' Mappurondo menegaskan bahwa pandangan politik merupakan hasil dari interaksi sosial dan kebudayaan, tidak hanya faktor politik semata.

Sebagai orientasi politik masyarakat adat Penghayat Kepercayaan Ada' Mappurondo di Desa Petangan pada Pemilu 2019-2024, mereka mengadvokasi untuk melindungi hak demokrasi dan kebebasan berpendapat politik sebagai bagian dari warisan budaya dan kepercayaan mereka. Ini mencerminkan pemahaman bahwa pandangan politik merupakan konstruksi sosial manusia,

yang dipengaruhi oleh faktor kebudayaan, kepercayaan, dan interaksi sosial dalam masyarakat.

Peraturan perundang-undangan tentang kebebasan berpendapat:

- a. Kebebasan berpendapat merupakan salah satu hak asasi manusia (HAM) yang dijamin oleh konstitusi. Negara wajib untuk memenuhi dan melindungi hak tersebut.
- b. Pasal 28 UUD 1945 berbunyi, “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.” Selain itu ada juga Pasal 28E Ayat 3 yang berbunyi, “setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.”
- c. Jaminan dan perlindungan terhadap kebebasan berpendapat dipertegas dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Kebebasan berpendapat tertuang dalam pasal 23 Ayat 2 dan pasal 25.
- d. Menurut Pasal 23 ayat 2, setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarkan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan/atau tulisan, melalui media cetak maupun elektronik, dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa. Sementara itu pasal 25 menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapat di muka umum, termasuk hak untuk mogok sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ampulembang, & Debora Tiku. (2023). Dekonstruksi Budaya Pada Gelar Indo' Dalam Masyarakat Adat Di Mamasa. *LOGONZOES: Jurnal Teologi, Sosial dan Budaya*. Vol. 3, 69–84.
- Andri J.S. (2022). Wahyu Dalam Aluk Mappurondo. *Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristen*. Vol. 3, 150-167.
<https://doi.org/10.34307/sophia.v3i2.102>
- Anwar H. (2015). Orientasi Politik Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012 Di SMK Negeri 1 Pontianak. *Jurnal Ilmui Sosial Dan Humaniora*, Vol. 20, 1-11.
- Asriani, & Nizar. (2023). Orientasi Politik Panggulang Pada Pemilihan Kepala Desa Karana. *Jurnal Fase Kemajuan Sosial dan Politik: Faksi*. Vol. 9, 11–20.
- Choirul A.R. (2014). Kebijakan Pemerintah Terkait Hak Sipil Penghayat Kepercayaan dan Implikasinya Terhadap Perkembangan Penghayat Kepercayaan di Ponorogo. *Jurnal Kodifikasi*. Vol. 8, 3-21
<https://doi.org/10.18784/smart.v4i2.649>
- Dettu. (2024, Januari 14). Deskripsi Singkat Organisasi Mappurondo Kabupaten Mamasa. (Saelmi, Pewawancara)
- Exel Allolayuk, & Pujo Widodo. (2024). Efektivitas Penyelesaian Konflik Sosial Melalui Kearifan Lokal (Hukum Adat) Di Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat. *Jurnal Kewarganegaraan*. Vol. 8, 1039–1046.
- Harruma I. (2022, Oktober, 4). *UU Yang Mengatur Kebebasan Berpendapat Masyarakat*. Diakses dari Komnas Hak Asasi Manusia:
<https://nasional.kompas.com/read/2022/10/04/01000091/uuyangmengatur-kebebasan-berpendapat>
- Hidayat, F. (2023). Eksistensi Paondo sebagai Model Pengajaran bagi Penghayat Ada'. *Pusaka Jurnal Khazanah Keagamaan*. Vol. 11, 2023.
- Mansyur & Irwansyah. (2020). Rasionalitas Orientasi Politik Masyarakat Nelayan Kabupaten Majene Pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014. *Jurnal Magister Ilmu Politik*.

- Nurkidam, Mahyuddin, & Aminah, S. (2023, Desember). Ada' Mappurondo Taboos: The Ecological Wisdom of the Mamasa. *KURIOSITAS*, 153-167. Diambil kembali dari <http://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/kuriositas>
- Orientasi: Pengertian, Tujuan, Jenis, Dan Tahapan. (2023, Maret, Jumat) Diakses dari detik.com situs web. <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5968069/orientasi-pengertian-tujuan-jenis-dan-tahapan>
- Priyanti N. & Cahyadi R.K (2014). Orientasi Politik Masyarakat Dalam Pemilukada Kabupaten Lampung Barat Tahun 2012. *Jurnal Administrasi Negara*. Vol 3, 74-88.
- Puspitasari, Indah. (2024). Persepsi Dan Orientasi Politik Generasi Muda Terhadap Pemilihan Partai Politik. *De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. Vol. 4, 76–85.
- Rijali A. (2018). Analisis Data Kualitatif. *Jurnal Alhadharah*. Vol. 17, 81-95
- Saputra, Merson, & Julpita. (2022). Kearifan Lokal Di Mamasa: Budaya Tabe' Sebagai Nilai Hospitalitas Dalam Bermasyarakat. *Paper Kuliah Metode Penelitian*. <http://dx.doi.org/10.31219/osf.io/5xkdj>.
- Sarbaini. Kiftiah M., & Rahman G. (2014). Orientasi Politik Masyarakat Terhadap Pemilihan Partai Politik di Kelurahan Melayu Kecamatan Banjarmasin Tengah. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*. Vol. 4, 600-607.
- Sulaiman (2018). Problem Pelayanan Terhadap Kelompok Penghayat Kepercayaan di Pati, Jawa Tengah. *Jurnal SMART Studi Masyarakat*. Vol. 4, 207-220.
- Zainuddin. (2013, November, 11). *Teori Kontruksi Sosial*. Diakses: <https://uin-malang.ac.id/r/131101/teori-konstruksi-sosial.html>